



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI

Nomor : W.30.HH.05.05 -04 Tahun 2022

Nomor : 180/87/Setwan/2022



TENTANG

FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

di hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu  
Puluh Dua, bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini

**ANTHONIUS M. AYORBABA** : Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM  
Provinsi Papua, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Papua,  
berkedudukan di Jayapura, beralamat di  
Jalan Raya Abepura No. 37 Kotaraja  
Jayapura yang selanjutnya disebut Pihak I.

**ERRICS WARIKAR** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Supiori, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Supiori  
berkedudukan di Supiori beralamat di  
Marsram, Kec. Supiori Tim., Kabupaten  
Supiori, Papua selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I	Pihak II
	



Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak

hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Kantor Wilayah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di daerah sesuai petunjuk teknis dari Unit Eselon.
- b. Pihak II adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Pihak I	Pihak II
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Pihak I	Pihak II
re	g

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama fasilitasi pembentukan peraturan daerah untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

#### Pasal 2



##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. melakukan kajian peraturan daerah;
- b. penyusunan propemperda inisiatif DPRD;
- c. penyusunan naskah akademik;
- d. penyusunan rancangan peraturan daerah;
- e. pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda; dan
- f. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pihak I	Pihak II
	

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak I	Pihak II
<i>u</i>	<i>f</i>

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 8

### KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. Pihak I

Narahubung : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Alamat : Jalan Raya Abepura No.37 Kotaraja Jayapura.

Telepon/Faks : Tlp/WA (081344307762).



b. Pihak II

Narahubung : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Supiori.

Alamat : Marsram, Kec. Supiori Tim., Kabupaten Supiori,  
Papua

Telepon/Faks : Tlp/WA ( 082114739775 )

(2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

## Pasal 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. bencana alam dan non-alam;
  - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

## Pasal 10

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I

ANTHONIUS M. AYORBABA

Pihak II

ERRICS WARIKAR



Pihak I	Pihak II